

**DISKURSUS KHILAFAH DALAM MEDIA TELEVISI INDONESIA:
(Studi Analisis Wacana Kritis Program Acara Aiman episode “Mendadak Khilafah”
di KompasTV)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Program
Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika**

Oleh:

MUHAMMAD ALAN PUTRA IRAWAN

L100130074

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**DISKURSUS KHILAFAH DALAM MEDIA TELEVISI INDONESIA:
(Studi Analisis Wacana Kritis Program Acara Aiman episode “Mendadak Khilafah” di
KompasTV)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

MUHAMMAD ALAN PUTRA IRAWAN

L100130074

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Yudha Wirawanda, MA

NIK. 100.1747

HALAMAN PENGESAHAN

**DISKURSUS KHILAFAH DALAM MEDIA TELEVISI INDONESIA:
(Studi Analisis Wacana Kritis Program Acara Aiman episode “Mendadak Khilafah” di
KompasTV)**

Oleh:

MUHAMMAD ALAN PUTRA IRAWAN

L100130074

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Komunikasi dan Informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Yudha Wirawanda, MA
(Ketua Dewan Penguji)
2. Rinasari Kusuma, M.I.Kom
" (Anggota I Dewan Penguji)
3. Fajar Junaedi, S.Sos., M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,



Nurghyatna, Ph.D
NIK. 881

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dPublikasi ini tidak ak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 6 Maret 2018

Penulis



MUHAMMAD ALAN PUTRA IRAWAN

L100130074

**DISKURSUS KHILAFAH DALAM MEDIA TELEVISI INDONESIA:
(Studi Analisis Wacana Kritis Program Acara Aiman episode “Mendadak
Khilafah” di KompasTV)**

Abstract

Dalam kasus Indonesia, media pernah menjadi alat di tangan pemerintah untuk mendominasi jagat wacana, sehingga wacana yang dianggap berseberangan dan mengancam eksistensi struktur politik tidak akan diberi ruang. Di era reformasi, media kembali tumbuh bebas dengan beragam kepentingannya. Termasuk media KompasTV, ketika mengangkat tema khilafah yang ditayangkan lewat program acara Aiman pada Senin, 12 Juni 2017. Aiman membahas tema tersebut ketika isu khilafah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Dalam paradigma kritis, penggunaan bahasa dalam media bukanlah sesuatu yang alamiah dan bersifat netral, melainkan dilakukan secara sengaja dan memiliki tujuan tertentu. Melihat hal itu, peneliti tertarik untuk mengetahui wacana khilafah yang hendak dibangun KompasTV melalui program acara tersebut. Unit analisis penelitian ini berupa teks lisan dan tulisan dalam tayangan Aiman berjudul “mendadak khilafah”. Peneliti menggunakan teori wacana Michel Foucault untuk membedah bagaimana praktik kekuasaan dijalankan. Dengan menggunakan teknik analisis wacana kritis Norman Fairclough diperoleh hasil bahwa KompasTV membangun wacana khilafah terlihat sebagai ideologi negatif, berbahaya, dan diposisikan sebagai ide terlarang yang bisa mengancam keutuhan bangsa. Wacana ini sekaligus menunjukkan bahwa KompasTV menjadi bagian dari media partisan untuk melanggengkan ideologi dominan yang dianut negara. KompasTV melakukan praktik diskriminasi dan pengucilan terhadap ideologi khilafah, karena perjuangan penegakkan khilafah di Indonesia dianggap berkonfrontasi dan mengancam struktur kekuasaan yang ada.

Kata kunci: Analisis wacana kritis, Khilafah, Aiman, KompasTV

In Indonesian case, media used to be a tool of government to dominate the universe of discourse, so the discourse that considered as an opposition and threaten the existence of political structure, will not have any space. In this reformation era, the media freely rise again with many kinds of importance. Includes *KompasTV* media, when which appoint *khilafah* theme that shown on the television program called *Aiman*, in Monday, 12th of June 2017. *Aiman* talked about *khilafah* theme, which is hot topic in society life. In criticism paradigm, the using of language in media it is not a natural and not neutral, but it is intentionally done with some purpose behind it. By looking in this case, the writer interests to know *khilafah* discourse that will be constructed in *KompasTV* by the mentioned television program. This analytical unit in form of spoken text and the written text in *Aiman*, which entitled “*Mendadak Khilafah*.” The writer uses discourse theory by Michel Foucault to uncover how is the dominance practical doing. By using critical discourse analysis technique, by Norman Fairclough which has result that *KompasTV* constructs *khilafah* discourse considered as negative ideology, dangerous, and positioned as forbidden idea which can be threatening the unity of nation. This discourse also shows that *KompasTV* is the part of media member to perpetuate dominant ideology that embraced by this nation. *KompasTV* practicing discrimination and excision to *khilafah* ideology, because the struggle of enforcement of *khilafah* in Indonesia assumed as confronting and threatening the structure of nation authority which exist.

Keywords: Critical Discourse Analysis, Khilafah, Aiman, KompasTV

1. PENDAHULUAN

Media televisi telah membawa manusia pada dunia yang penuh bermacam-macam hal, mulai dari permasalahan kesehatan, politik hingga ilmu pengetahuan. Keberadaan media massa tidak hanya digunakan untuk menyebarkan informasi, akan tetapi juga alat untuk menyusun agenda kepentingan (George Gerbner dalam Littlejohn & Foss, 2009). Pengetahuan masyarakat tentang peristiwa dunia, sebagian besar didapatkan melalui berita yang ada di media. Padahal masyarakat tidak mempersepsi peristiwa, melainkan mempersepsi berita tentang peristiwa (Mursito, 2012).

Seperti berita-berita di media televisi Indonesia, sejak Reformasi 1998, lansekap Industri media di Indonesia telah berubah, ditandai tidak hanya bertambahnya jumlah televisi swasta, tetapi juga perubahan struktur industri media mempengaruhi masyarakat. Media berubah menjadi ruang yang diperebutkan oleh berbagai kelompok kepentingan, mulai dari politik, bisnis hingga kelompok agama yang bersaing untuk meraih kendali dan pengaruh. Sehingga setiap memproduksi berita, media akan selalu menyesuaikan kepentingan politis pemiliknya (Nugroho, Putri, & Laksmi, 2012). Salah satunya adalah media KompasTV, yang menobatkan dirinya sebagai televisi berita nasional yang independen dan terpercaya (KompasTV, 2017). Satu program tayangan unggulan yang membahas isu-isu hangat yang sedang diperbincangkan masyarakat adalah program acara Aiman (Ruri, 2016).

Beredar di tengah masyarakat akan mencuatnya ide khilafah, jika dilihat pengertiannya, secara etimologi Khilafah berasal dari bahasa arab *khalafah*, *yakhfulu*, *khilafatan* yang berarti menggantikan atau menempati kedudukannya (Khalil, 1984). Sudrajat (2009) menjelaskan kata *khilafah* menunjuk pada serangkaian tindakan seseorang yang disebut *khalifah*. Sehingga secara terminologi, khilafah merupakan satu bentuk pemerintahan Islam, kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia yang di dalamnya menerapkan hukum-hukum syari'at Islam sebagai landasan negara, dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia agar tercapai kemaslahatan bersama (An-Nabhani, 2011).

Di Indonesia, terdapat beberapa organisasi yang menyuarakan ide khilafah, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), dan Laskar Jihad (Setiawan, 2008). Pembicaraan tentang penegakkan khilafah semakin memanas, khususnya saat pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2017, sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Pemerintah melakukan hal itu dalam rangka mencabut *legal standing* Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai salah satu ormas yang menyuarakan tegaknya khilafah di Indonesia, pemerintah beranggapan bahwa ide

yang diusung HTI bertentangan dengan Ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia 1945 (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Wiranto (dalam Erdianto, 2017) mengungkapkan bahwa khilafah adalah ide yang mengancam kedaulatan politik Negara Indonesia, ide yang diusung HTI sangat berpotensi meniadakan konsep *nation state*, untuk mendirikan negara Islam dalam konteks wilayah yang lebih luas.

Atas kejadian tersebut, suatu hal menarik ketika KompasTV mengangkat isu “khilafah”, melalui program Aiman edisi Senin, 12 Juni 2017 berjudul “Mendadak Khilafah.” Pertama, dari aspek historis dijelaskan dalam buku Kekerasan Budaya pasca 1965, bahwa pada awal tahun 1960 ketika media Kompas didirikan, PK Ojong selaku pendiri memiliki hubungan erat dengan Ivan Kats, seorang agen CIA yang masuk ke dalam *Congres For Cultural* yang berpusat di Prancis. Konggres itu bertujuan menggalang gerakan anti komunis dan menyebarkan ideologi sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme. Ivan Kats juga termasuk pendorong akan berdirinya media Kompas di Indonesia (Herlambang, 2015). Sedangkan sekulerisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam, karena paham sekulerisme memisahkan urusan dunia dari agama, serta tidak menetapkan Undang-undang negara sesuai dengan syari’at islam (Jibrin, 2009).

Kedua, pemikiran tentang tegaknya khilafah sendiri memiliki perbedaan pandangan dari kelompok-kelompok Islam. Setiawan (2008) memaparkan, kelompok seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front pembela Islam (FPI), dan Laskar Jihad memiliki pandangan agar syariat Islam dijadikan landasan negara dan hukum positif di Indonesia.

Sementara gerakan lain, seperti ormas Islam Nahdlatul Ulama memandang bahwa sistem pemerintahan khilafah yang pernah dipraktikkan saat masa Khulafa’ al-Rasyidun adalah model yang relevan pada masa itu, namun pada saat umat manusia sekarang ketika menggunakan model negara-negara bangsa (*nation state*), maka sistem khilafah sudah kehilangan relevansinya, bahkan untuk membangkitkan kembali merupakan suatu utopia (Suara Nahdlatul Ulama, 2014). Selain itu Muhammadiyah maupun parpol-parpol yang berhaluan kebangsaan, menyatakan bahwa NKRI yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk final dan konsensus kebangsaan Indonesia (Wahid, 2009). Pandangan tersebut juga diperkuat oleh survei *Saiful Mujani Research and Consulting* (SMRC) tahun 2017, SMRC merilis bahwa hanya 9,2 persen responden yang setuju jika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diganti menjadi negara khilafah, sehingga

terbilang minoritas. Sementara sebanyak 79,3 persen responden tidak menyetujuinya (Ihsanuddin, 2017).

Dalam mengatur masyarakat, negara memiliki peran sebagai agensi yang bekerja memberikan persuasi kepada anggota masyarakat, agar selalu patuh terhadap ideologi dominan. Negara melakukannya dengan menerapkan sistem politik-hukum, agama, pendidikan, kebudayaan, hingga komunikasi media (Louis Althusser dikutip dalam Budi, 2004). Begitu juga dalam kasus Indonesia misalnya, media pernah menjadi alat di tangan pemerintah untuk mendominasi jagat wacana, sebagai alat untuk melegitimasi eksistensi struktur politik dan ekonomi yang berkuasa, sehingga wacana yang dianggap berseberangan dan mengancam kekuasaan tidak akan diberi ruang (Dosi, 2012). Kelompok dominan terus melakukan manipulasi ideologi kepada kelompok yang tidak dominan, dengan melakukan kampanye disinformasi agama tertentu yang menyebabkan suatu kerusuhan atau bertindak kriminal melalui kontrol media, dan sebagainya (Teun A. Van Dijk dalam Eriyanto, 2006).

Dari paparan tersebut, perhatian KompasTV terhadap pemberitaan khilafah, mengindikasikan bahwa ada wacana yang ingin dibangun media. Wacana diartikan sebagai praktik ideologi yang memiliki strategi utama dengan membuat kesadaran kepada khalayak bahwa dominasi itu diterima secara *taken for granted* (Eriyanto, 2006). “Dalam studi ini, dominasi yang dimaksud adalah berhubungan dengan wacana kekuasaan, pelaksanaan dan posisi strategis yang selalu berpretensi menghasilkan rezim kebenaran melalui media” (Dosi, 2012, p. 52).

Pengertian wacana dijelaskan Norman Fairclough sebagai praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap melalui tulisan, pembicaraan, kiasan, gambar, diagram, film atau musik (Haryatmoko, 2016). Wacana juga diartikan sebagai hubungan dialektis struktur, yang dirancang untuk membentuk kembali dan melanggengkan sifat ideologis struktur kekuasaan (Fairclough, 1995). Penelitian terhadap wacana sebelumnya pernah dilakukan oleh Debing Feng dalam jurnalnya yang berjudul *Doing “Authentic” News: Voices, Forms, and Strategies in Presenting Television News*, tahun 2016. Penelitian tersebut lebih berfokus terhadap bentuk linguistik dan strategi presentasi dalam penyajian berita, serta menjelaskan format produksi wacana yang digunakan BBC news dan CCTV news dalam menyajikan makna atau pesan dalam berita. Sehingga hanya menjelaskan ulang realitas dari bentuk, strategi dan format wacana dalam menyajikan berita televisi (Feng, 2016).

Berbeda dengan penelitian ini, dalam studi ini peneliti berusaha mengambil posisi untuk mendekonstruksi realitas, membongkar, dan mendemistifikasi bentuk-bentuk dominasi media. Karena dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough,

yaitu menganalisis bagaimana makna diciptakan di dalam konteks sosial-politik tertentu, dan peran dari tujuan pembicara atau posisi pengarang dalam konstruksi wacana tersebut (Haryatmoko, 2016). Selain itu, analisis wacana kritis juga mengkaji tentang cara bagaimana penyalahgunaan kekuasaan, ketidaksetaraan dan dominasi ideologi yang diproduksi oleh media secara tersembunyi maupun terang-terangan (Van Dijk dalam Suranto, Herlina S & Setiawan, 2017).

Penelitian serupa yang menggunakan analisis wacana kritis Norman Fairclough juga sudah pernah dilakukan dalam jurnal yang berjudul *The Representation of Islamophobia: A Critical Discourse Analysis of Yahoo News*, oleh Mostafa Amiri, Mohammad Reza Hashemi dan Javad Rezaei tahun 2015. Penelitian tersebut berfokus untuk menganalisis wacana yang dimanfaatkan situs Yahoo dalam membahas islamophobia. Peneliti menggunakan analisis wacana kritis karena ingin menyelidiki kekuasaan dan ideologi yang secara sengaja atau tidak sengaja sedang dijalankan. Peneliti menemukan adanya ideologi kolonial barat yang sedang dipaksakan lewat situs Yahoo, terlihat dari penggunaan leksikon, teks, dan video yang terlalu berlebihan, sehingga memperkenalkan Islam terlihat sebagai agama kekerasan, ekstremisme, keterbelakangan, monolitik dan terorisme (Amiri, Hashemi & Rezaei, 2015).

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teori wacana dan kekuasaan Michel Foucault. Teori tersebut memandang bahwa kekuasaan adalah kekuatan relasional yang secara mapan dan terorganisasi menembus tubuh sosial, yaitu dengan mekanisme pengaturan yang melibatkan disiplin, institusi dan profesionalisme. Sehingga kekuasaan dapat membentuk pengetahuan dan hierarki yang bekerja secara samar, tidak terlihat, tetapi mendominasi dengan menghasilkan wacana dan kebenaran (Karlberg, 2005).

Sebelumnya, pemberitaan wacana negatif Islam sudah pernah dilakukan Harian Kompas, yaitu terjadi aksi sejuta umat muslim di Monas pada 7 Januari 2000, sebagai wujud reaksi keras kelompok-kelompok Islam terhadap pembantaian warga muslim di Maluku Utara. Sudibyo (2006) memaparkan, dibandingkan dengan Harian Republika dan Suara pembaruan, ditemukan fakta bahwa Kompas lebih banyak melakukan penggambaran negatif terhadap jihad Islam, khususnya terhadap kelompok islam yang ikut dalam aksi tersebut.

Termasuk dalam studi ini, peneliti juga tertarik untuk mengetahui bagaimana wacana khilafah yang ditampilkan KompasTV, lewat program acara Aiman “mendadak khilafah” edisi Senin, 12 Juni 2017. Sehingga, penelitian ini diharapkan bisa membongkar kepentingan KompasTV dibalik pemberitaan khilafah Islam, membuka tabir ideologi yang mendominasi, dan menjadi solider dengan mereka yang membutuhkan perubahan.

1.2 TELAAH PUSTAKA

a. Media Massa dan Ideologi

“Istilah media massa mengacu kepada sejumlah media seperti surat kabar, majalah, film, radio, periklanan dan televisi. Media massa juga dapat diartikan sebagai praktik penyedia informasi dan hiburan kepada audiens. Dalam melakukan produksi, media sangatlah dipengaruhi oleh kepentingan korporat dan aturan negara,” (McQuail dikutip dalam O’sullivan, Hartley, Saunders, Montgomery & Fiske, 1994, p. 172-173).

Di masa lalu, pemerintahan yang otoriter mengendalikan isi media. Dewasa ini, berbagai kelompok memiliki akses untuk mempengaruhi dan mengarahkan isi media sesuai dengan ideologi kepentingannya, mereka menyadari bahwa media menjadi arena untuk menguasai wacana baik politik maupun bisnis (Dosi, 2012). Menurut Antonio Gramsci (dalam Kristeva, 2015) ideologi ialah pandangan hidup yang mengatur manusia dan memberikan tempat bagi manusia untuk bergerak, mendapatkan kesadaran akan posisi serta perjuangan mereka.

Beroperasinya ideologi dibalik media, tidak terpisah dari mekanisme ketersembunyian dan ketidaksadaran yang merupakan bentuk keberhasilan dari sebuah ideologi. Sehingga dengan media, ideologi disebarluaskan pengaruhnya secara tersembunyi dan halus (Maquuddin, 2009). Aparatus negara bersama instansi media mereproduksi konten agar persepsi masyarakat sesuai dengan ideologi dominan yang dibenarkan negara (Althusser dalam Williams, 2003).

Terutama isu agama, Muttaqin (2012) menyatakan, bahwa agama adalah isu strategis yang menjadi instrumen untuk memobilisasi pembaca, cara yang dilakukan melalui produksi dan reproduksi nilai-nilai tentang agama. Dalam konteks Indonesia, pemahaman agama terbangun dalam beberapa paham atau aliran yang secara umum terbagi dalam tiga spektrum utama, yaitu fundamentalis, modernis, dan liberal. Begitu halnya dengan media, praktik produksi juga bersifat ideologis, terlihat dari media dalam melakukan peminggiran atau pengucilan kelompok tertentu dengan pilihan bahasa pengasaran aliran sesat, penistaan agama atau kafir. Termasuk dalam penelitian ini, ketika KompasTV mengangkat konten agama melalui salah satu program acaranya, menjadi hal yang perlu dianalisis secara mendalam. Sehingga dapat mengetahui kepentingan dibalik pemberitaan “Mendadak Khilafah” dengan menggunakan metode ilmiah.

b. Teori Wacana Foucault

Wacana dalam perspektif pascastrukturalis tidak mengutamakan prinsip-prinsip komunikasi, tetapi lebih menitikberatkan pada pengetahuan dan kekuasaan. Michel Foucault memahami kekuasaan sebagai kekuatan relasional yang secara mapan dan terorganisasi menembus tubuh sosial, yaitu dengan mekanisme pengaturan yang melibatkan disiplin, institusi dan profesionalisme. Sehingga kekuasaan dapat membentuk pengetahuan dan hierarki yang bekerja secara samar, tidak terlihat, tetapi mendominasi dengan menghasilkan wacana dan kebenaran (Karlberg, 2005).

Dosi (2012) menjelaskan, wacana dominan dapat mendiskriminasi atau mengucilkan wacana yang bertentangan dengan wacana yang berkembang. Pengucilan dilakukan salah satunya dengan membuat klasifikasi tentang mana yang baik dan buruk, mana yang bisa diterima dan mana yang tidak bisa diterima. Sehingga memunculkan pihak berkuasa semakin dominan, serta mendiskriminasi kelompok tertentu agar semakin lemah. Hal ini dilakukan karena wacana dipandang sebagai medium kelompok dominan dalam mempersuasi dan mengkomunikasikan ideologi kepada khalayak (Eriyanto, 2006).

Wacana dalam program acara Aiman “mendadak khilafah” ini akan dianalisis sesuai dengan prosedur tiga kategori: *pertama*, aturan yang mengendalikan apa yang dapat dikatakan dan tidak dapat dikatakan. *Kedua*, aturan yang menentukan siapa yang harus mengadakan pembicaraan. *Ketiga*, bentuk konsep atau teori yang diasumsikan diterima sebagai suatu pengetahuan dalam bentuk wacana (Michel Foucault dalam Dosi, 2012).

Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan pendekatan Ekonomi Politik media. Noam Chomsky (dalam Ibrahim & Akhmad, 2014) menjelaskan, ada beberapa model organisasi media berdasarkan sistem ekonomi dan politik, salah satunya adalah model kontrol-negara. Artinya, media berjalan sesuai pada sistem politik yang berfungsi, pada praktiknya media akan selalu sejalan dengan kekuatan-kekuatan yang memiliki kuasa untuk mendominasi negara, dan oleh aparatus manajer budaya yang berkuasa. Seperti pada penelitiannya Eugenie P. Almeida yang berjudul *Palestinian and Israeli Voices in Five Years of U.S. Newspaper Discourse*, penelitian tersebut bertujuan untuk melihat wacana liputan koran di media Amerika Serikat, dalam menyoroti konflik Israel-Palestina sejak 2002 hingga 2006. Hasil penelitian menemukan fakta, bahwa media berita AS telah membingkai aktor penting dan melakukan pembingkai konflik yang lebih banyak berkiblat pada pandangan Negara Israel (Almeida, 2011).

Jika dalam konteks ini, pendekatan ekonomi politik media difungsikan untuk mengetahui subjek atau suprastruktur yang paling berperan mengendalikan media

KompasTV dalam membentuk wacana khilafah. Sehingga melalui pendekatan ekonomi politik Noam Chomsky, hasil analisis akan membantu mengelaborasi pendekatan wacana Michel Foucault, khususnya untuk menemukan bagaimana negara beroperasi dalam relasi kekuasaan yang dibangun secara sistematis dan produktif.

c. Wacana Khilafah

Suratno (2008) menjelaskan, perdebatan tentang penegakan Islam sebagai dasar negara sudah dimulai sebelum kemerdekaan, yaitu pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), saat itu ada dua aliran yang muncul yakni golongan Islamis yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan golongan nasionalis yang menginginkan pemisahan urusan negara dan urusan Islam, setelah perdebatan panjang, pada akhirnya diambil jalan tengah dengan menyepakati dasar Negara Indonesia adalah pancasila.

Hingga pasca reformasi, konsepsi negara Islam atau khilafah juga menjadi wacana yang diangkat media dengan berbagai sudut pandang, khususnya saat pemerintah mengeluarkan sikap (PERPPU) nomor 2 tahun 2017. Dalam jurnal yang berjudul Analisis Wacana terhadap Teks Berita Pembubaran HTI pada Media Online Liputan6.com, dijelaskan bahwa Liputan6.com melakukan strategi inklusi secara berulang-ulang dalam beberapa judul, berita dan penempatan struktur kalimatnya memperlihatkan keberpihakan liputan6.com terhadap sikap pemerintah (Burhan, 2017). Begitu halnya MediaIndonesia.com yang melakukan pemberitaan dengan judul Menjaga Keberagaman Menjadi Tugas Bersama, surat kabar online media Indonesia menampilkan bahwa masyarakat harus menjaga keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia, dengan dukungan semangat kebhinekaan dan pancasila, tanpa harus menjadikan khilafah sebagai landasan negara (Ric, 2017).

Berbeda dengan tabloid Media Umat, Samsul (2015) menjelaskan bahwa tabloid media umat menampilkan representasi akan dukungan terhadap ide khilafah, sehingga pemberitaannya lebih berorientasi pada narasi nilai ideologis dan politis Islam. Dari berbagai sudut pandang tersebut, yang menjadi pertanyaan adalah wacana khilafah seperti apa yang hendak ditampilkan KompasTV melalui program acara Aiman “mendadak khilafah.” Sedangkan pemilik media KompasTV, Jakob Oetama ialah seorang yang beragama katolik (Wijayanto, 2016).

2. METODE

Pada penelitian ini, tipe penelitian yang dipakai adalah kualitatif. Dengan menggunakan perspektif kritis, untuk memahami struktur kekuasaan dan kepercayaan yang mendominasi di masyarakat, termuat dalam wacana media yang mendukung dan mempromosikan ideologi tertentu, serta meniadakan kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat (Morrisan, 2014).

Penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode berpikir dengan cara menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat individual (Pujileksono, 2016). Peneliti menganalisis data dengan menggunakan pisau analisis wacana kritis Norman Fairclough, yaitu dengan menganalisis pada tingkat *text*, *discourse practice*, dan *sociocultural practice* yang melatarbelakangi pemberitaan khilafah di media KompasTV. Dalam model analisis wacana kritis menekankan pada aspek bahasa dan wacana dalam tataran filosofis komunikasi, dengan pertanyaan siapa yang menjadi subjek berwenang untuk mengontrol media, siapa yang diuntungkan serta ideologi apa yang ada dibalik media (Fairclough, 1995).

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Teks berupa lisan dan tulisan dalam tayangan Aiman “mendadak khilafah” edisi Senin, 12 Juni 2017 dengan durasi video 42 menit 38 detik. Haryatmoko (2016) menjelaskan bahwa teks yaitu semua yang mengacu pada wicara, tulisan, grafik, dan kombinasinya atau semua bentuk linguistik teks.

Dalam penentuan sampel, penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling*, khususnya *judgment sampling*, yaitu sampel diambil atau ditentukan sesuai dengan maksud dan tujuan tertentu. Sampel ditentukan karena peneliti menganggap sesuatu tersebut memiliki dan dapat memberikan informasi yang diperlukan sesuai kepentingan penelitian (Pujileksono, 2016). Kepentingan yang dimaksud yaitu informasi-informasi yang berkonotasi mempersoalkan khilafah.

Dalam pengumpulan data, dilakukan dengan cara *pertama*, mendokumentasikan video-video program acara Aiman “mendadak khilafah”, yang diunggah oleh *channel* resmi KompasTV di situs berbagi video Youtube. Selanjutnya mentranskrip tulisan dan percakapan dari video tayangan tersebut. *Kedua*, studi pustaka dengan cara menghimpun informasi-informasi yang relevan dengan topik yang akan diteliti, diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal, dan situs-situs yang terkait.

Selanjutnya, teknik analisis data yang dipakai adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough yang memuat tiga dimensinya:

a. Analisis Teks:

Norman Fairclough menjelaskan pada tahap analisis teks (mikrolevel) dianalisis representasi dan artikulasi dari pemikiran, kepentingan, dan ideologi yang dilekatkan pada teks (Haryatmoko, 2016). Teks disini dianalisis secara linguistik, dengan melihat kosakata, semantik, leksison dan tata kalimat. Selanjutnya dianalisis koherensi dan kohesivitas bagaimana antarkata atau kalimat digabung sehingga membentuk sebuah pengertian (Eriyanto, 2006).

Semua elemen dianalisis untuk melihat masalah berikut. *Pertama*, ideasional yang merujuk pada representasi ideologi tertentu. Kedua, relasi yang merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan di antara wartawan dengan pembaca. *Ketiga*, identitas yang merujuk pada konstruksi tertentu bagaimana seorang wartawan mengidentifikasikan dirinya sendiri (eriyanto, 2006).

b. Praktik Diskursif

Dalam dimensi ini, peneliti berfokus pada acara pengarang teks mengambil wacana dan *genre*, dengan memerhatikan bagaimana hubungan kekuasaan dimainkan. Pada dimensi kedua ini mencakup *pertama*, sejauh mana kekuatan kenyataan sehingga bisa mendorong tindakan atau sifat afirmatifnya, yaitu dengan cara melihat tiga dimensi bahasa yang meliputi *locutionary*, yaitu objek analisa terkait dengan makna bahasa dan wacana. *Illocutionary*, bahasa memiliki implikasi terhadap sikap pewicara (memerintah, membujuk, berjanji, menuduh). Terakhir *perlocutionary*, yaitu efek terhadap lawan bicara atau pemirsa (sedih, semangat) dan kemampuan wacana menciptakan realita (J.L. Austin dalam Haryatmoko, 2016).

Selain itu, tahap *kedua* akan dilihat koherensi teks-teks yang sudah masuk ke wilayah interpretasi, dan *ketiga*, masalah intertekstualitas, yaitu kehadiran unsur-unsur dari teks lain dalam suatu teks berupa kutipan, acuan atau isi ringkasan (Haryatmoko, 2016).

c. Praksis sosial

Dalam dimensi ini sudah mulai masuk pada pemahaman intertekstualitas, peristiwa sosial yang kelihatan bahwa teks dibentuk oleh dan membentuk praksis sosial. Metodenya dengan menganalisis praktik sosio-kultural yang mencakup level situasional, institusional, dan sosial. Setiawan (2011) menjelaskan *pertama*, level situasional: Teks berita dihasilkan kondisi tertentu. *kedua*, level institusional: pengaruh institusi organisasi terhadap produksi wacana, di antaranya seperti pengiklan, dan pemerintah. *ketiga*, level sosial: menganalisis bagaimana wacana yang muncul di media ditentukan oleh faktor perubahan masyarakat.

Selanjutnya analisis diarahkan pada eksplanasi yang berorientasi untuk menggambarkan diskursus sebagai bagian dari praktik sosial, dan menjelaskan determinasi diskursus terhadap struktur sosial serta efek reproduktifnya terhadap struktur tersebut. Baik efek yang berkaitan dengan memaparkan ataupun mengubah struktur sosial (Setiawan, 2011).

Yang terakhir, teknik validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode triangulasi teori, yaitu dengan membandingkan hasil akhir rumusan informasi penelitian dengan perspektif teori yang relevan. Hal itu dimaksudkan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan (Pujileksono, 2016). Triangulasi teori dilakukan dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau penjelasan pembanding, sehingga dapat meningkatkan kedalaman pemahaman akan fenomena yang diteliti. Karena fenomena yang diteliti pada dasarnya tidaklah semata-mata sebagai refleksi dari realitas dan bersifat independen, melainkan selalu berada pada hubungan dialektis yang berjalan aktif dan tidak terlepas dari praktik kekuasaan yang ada (Norman Fairclough dalam Munfarida, 2014).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memahami wacana khilafah yang dibangun KompasTV melalui program acara Aiman, maka dilakukan analisis teks pada data teks lisan dan tulisan yang termuat dalam tayangan Aiman berjudul “mendadak khilafah” pada Senin, 12 Juni 2017. Program acara Aiman terdiri dari lima segmen, pada tayangan yang berdurasi 42 menit 38 detik itu, Aiman melakukan wawancara terhadap berbagai tokoh seperti Ismail Yusanto yang diposisikan sebagai juru bicara ormas HTI, Sofyan Sauri selaku mantan anggota ISIS, Din Syamsuddin sebagai tokoh agama. Selain itu, Aiman juga melakukan insert dari ungkapan Rokhmat S. Labib selaku pimpinan HTI, Wiranto selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Jokowi sebagai presiden Indonesia, serta Ma'ruf Amin selaku ketua MUI. Data yang diambil adalah berupa ungkapan reporter Aiman, insert survey dari *Saiful Mujani Research and Consulting*, data tekstual Wiranto, ungkapan Din Syamsuddin, serta pernyataan Ismail Yusanto. Peneliti menganggap sampel yang diambil tersebut mewakili informasi-informasi berkaitan dengan persoalan khilafah di Indonesia.

Tabel 1. Temuan data

Waktu	Segmen	Keterangan
0.25-0.30	Pembukaan program acara Aiman	Wiranto menyatakan Khilafah ingin meniadakan konsep negara bangsa
1.38-1.48	Pembukaan program acara Aiman	Aiman menjelaskan tujuan gerakan teroris ISIS dan Al-Qaeda untuk mendirikan negara khilafah.
2.22-2.55	Pembukaan program acara Aiman	Aiman memberikan pernyataan pembukaan bahwa kelompok HTI dan ISIS memiliki tujuan yang sama, yaitu mendirikan negara khilafah.
3.41-3.50	Pembukaan program acara Aiman	Ketua MUI Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa khilafah tidak disepakati di dunia negara-negara islam.
4.15-4.23	Pembukaan program acara Aiman	Aiman menjelaskan sejumlah kelompok teror ISIS & AL-Qaeda sudah mendeklarasikan khilafah terlebih dahulu sebelum HTI.
5.35-6.15	Pembukaan program acara Aiman	Aiman menampilkan survey <i>Saiful Mujani research and consulting</i> (SMRC)
7.00-7.30	Pembukaan program acara Aiman	Wiranto menyatakan sikap akan membubarkan ormas HTI.
3.10-6.00	Wawancara dengan Ismail Yusanto	Ismail Yusanto menjelaskan bahwa khilafah adalah ajaran Islam
3.30-3.42	Mengungkap gerakan ISIS	Aiman menjelaskan misi ISIS untuk membentangkan sayap untuk mendirikan khilafah di dunia.
0.54-2.45	Wawancara dengan Din Syamsuddin	Din Syamsuddin menjelaskan makna khilafah menurut pandangannya. Dan Aiman mempertanyakan yang dimaksud khilafah itu

		gagal paham.
3.34-4.00	Wawancara dengan Din Syamsuddin	Aiman mempertanyakan adanya kritik terhadap pancasila dan Din Syamsuddin menanggapi sebagai fenomena kritik yang radikal.
6.07-6.38	Penutup Aiman	Aiman memberikan pernyataan bahwa pancasila sudah sempurna dan tidak ada masalah.

Sumber: Olahan peneliti, 2018

3.1 Wacana Diskriminasi Khilafah

Bersumber dari data di atas, peneliti menganalisis teks lisan yang disampaikan oleh reporter Aiman

“dua kelompok yang sama sekali tak berhubungan, mempunyai cara yang berbeda. Hizbut tahrir dengan cara diplomasi, sedangkan ISIS dengan bom bunuh diri. Mengapa belakangan isu ini semakin mencuat dan mengkhawatirkan banyak pihak?”,

“Sejumlah kelompok teror seperti Isis dan Al-qaeda, sudah mendeklarasikan terlebih dahulu khilafah” serta “Isis, berlanjut dalam upaya melebarkan sayap menjalankan misi sedemikian rupa, membentangkan kekuasaan, tak lain untuk mewujudkan cita-cita khilafah di Dunia.”

Pada tingkat representasi kombinasi anak kalimat, khususnya secara kosakata, KompasTV memasukkan istilah khilafah ke dalam set kategori tindakan yang membahayakan banyak pihak, khilafah adalah aktivitas teror yang dilakukan oleh jaringan-jaringan teroris. Selain itu, istilah yang hendak disematkan pada kegiatan penegakkan khilafah adalah “terorisme.” Kaligis (dalam Sari, 2017) mendefinisikan pengertian terorisme sebagai *crime against state* atau bentuk kejahatan yang bertujuan untuk meneror masyarakat dan negara. Dengan demikian terdapat usaha untuk memunculkan subordinasi terhadap posisi ide khilafah di Indonesia. *Kedua*, pada tingkat tata bahasa, kata “ideologi khilafah HTI ingin

meniadakan negara bangsa,” dalam anak kalimat struktur transitif (Subjek+verb+objek) menunjukkan bahwa khilafah HTI digambarkan sebagai suatu tindakan yang berakibat meniadakan konsep negara bangsa (nasionalisme). Bentuk kalimat menempatkan “khilafah HTI” sebagai subjek, dan kata “negara bangsa” ditunjukkan sebagai objek dari tindakan penegakkan khilafah. Sehingga lebih menunjukkan metafora negatif yang mendiskriminasi keberadaan perjuangan ide khilafah di Indonesia.

Selain itu, disampaikan reporter Aiman,

“Ideologi negara kita adalah pancasila, akan tetapi sebagian orang-orang punya paham bahwa penerapan hukum Islam harus diterapkan di Indonesia, karena pancasila tidak cocok”

disambung dengan kalimat Din Syamsudin

“kalau seumpama tidak cocok, itu merupakan sebuah kritik yang terlalu radikal, akan tetapi ketika hukum Islam ikut menginspirasi hukum positif kita itu sah, tapi jangan disebut hukum Islam.”

Pada tingkat representasi rangkaian antar kalimat, dua kalimat tersebut menunjukkan adanya pernyataan saling mendukung, bahwa ideologi Negara Indonesia tetap harus sesuai dengan pancasila. Pernyataan di kalimat pertama ditunjukkan oleh kata “orang-orang yang punya paham,” sedangkan di kalimat kedua, Din Syamsudin sebagai mantan ketua Majelis Ulama Indonesia mengesankan pendapatnya sebagai ide dominan, karena sempat menjabat di lembaga yang memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa-fatwa agama. Sehingga kalimat pernyataan Din Syamsudin diposisikan sebagai *legitimate* dari pandangan reporter Aiman.

Program acara Aiman dari sisi penayangan informan berita juga menampilkan berbagai partisipan. Misalnya seperti organisasi HTI yang berusaha berjuang menegakkan khilafah, pihak pemerintah dan tokoh publik.

Disampaikan oleh Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia melalui laporan berita yang disajikan program acara Aiman

“Sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, HTI tidak menerapkan peran positif untuk mendorong proses pembangunan nasional, mencermati pertimbangan

tersebut dan mencermati aspirasi masyarakat, pemerintah secara tegas perlu mengeluarkan langkah-langkah hukum untuk membubarkan organisasi tersebut.”

Selain itu reporter Aiman juga menyatakan

“baru-baru ini, survei terkait khilafah dirilis oleh lembaga survei SMRC. Survei yang dilakukan Saiful Munjani Research and Consulting menyebutkan, ada 9,2% penduduk Indonesia menginginkan khilafah berdiri, sedangkan warga yang mendukung pemerintah menolak khilafah ada sebanyak 79,3 %.”

Dari dua kalimat tersebut, terdapat hubungan relasional antara pemerintah dengan reporter, dalam pemberitaan tersebut, relasi dapat ditunjukkan dari reporter KompasTV yang menyatakan bahwa mayoritas masyarakat menolak ide khilafah, sehingga memiliki hubungan pandangan yang sama, yaitu dengan menjadikan aspirasi masyarakat sebagai alasan pemerintah untuk membubarkan ormas HTI.

Sedangkan dalam teks lain, ditunjukkan dalam dialog yang ditampilkan antara reporter dengan tokoh publik Din Syamsudin, bermula dari pertanyaan Aiman

“Ketika memunculkan isu khilafah itu adalah ketidakpahaman, apa maksudnya?”

Lalu Din Syamsudin mengatakan

“ada kekeliruan pemahaman, atau bisa disebut gagal paham, karena khilafah yang dimaksud adalah sikap manusia dalam membangun bumi, bukan untuk menegakkan negara Islam”

Dalam pembahasan khilafah, progam acara Aiman di akhir tayangannya memilih menampilkan ulama yang mempunyai pandangan menolak khilafah. Din Syamsudin menjelaskannya sebagai suatu ide yang tidak sesuai dengan kesepakatan masyarakat Indonesia. Din Syamsudin menggunakan argumen “gagal paham” untuk menempatkan ide khilafah terkesan lebih rendah dibandingkan pandangan yang dianutnya. Sehingga hubungan relasional kekuasaan yang muncul ialah bentuk praktik dalam upaya menampilkan minoritas sebagai suatu hal yang utopis. Sehingga menjadikan argumen semakin dominan, karena diperkuat oleh pandangan pemerintah dan reporter media.

Kalimat lain disampaikan oleh reporter Aiman,

“khilafah adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu pemimpin, kekuasaannya adalah negara-negara diseluruh dunia, dengan menyatukan negara-negara yang memeluk beragama Islam mayoritasnya, Indonesia masuk dalam rencana. Dua kelompok yang sama sekali tak berhubungan, mempunyai cara yang berbeda. Hizbut Tahrir dengan cara diplomasi, sedangkan ISIS dengan bom bunuh diri. Mengapa belakangan isu ini semakin mencuat dan mengkhawatirkan banyak pihak?”

“Piagam jakarta yang mensyaratkan syariat Islam bagi pemeluknya, telah diadopsi dan diambil jalan tengahnya persis sehari pasca kemerdekaan Republik Indonesia, lima prinsip yang bahkan kita kenal sejak kecil, pancasila tak pernah melarang ibadah dan apapun yang sesuai dengan tuntunannya, karena Indonesia membebaskan para penganutnya. lalu apa masalahnya?”

Dalam ranah identitas, kedua kalimat tersebut mengidentifikasikan reporter Aiman berada di pihak pemerintah, yang secara jelas meyakini akan prinsip yang diberlakukan institusi negara, yaitu prinsip pancasila dan konsensus nasionalisme.

Dalam bagian kalimatnya,

“mengapa belakangan isu ini semakin mencuat dan mengkhawatirkan banyak pihak?”,

serta

“pancasila tak pernah melarang ibadah dan apapun yang sesuai dengan tuntunannya, lalu apa masalahnya.?”

Reporter Aiman secara eksplisit menunjukkan dirinya sebagai pihak yang mempermasalahkan penegakkan khilafah di Indonesia. Selain itu, kata “mengkhawatirkan”, memposisikan khilafah sebagai pandangan kaum minoritas yang dapat mengancam, dan membahayakan bagi masyarakat Indonesia. Sehingga reporter Aiman tidak menempatkan dirinya secara mandiri atau sebagai media yang netral sesuai dengan jargon medianya “independen terpercaya,” melainkan bagian dari kelompok penguasa pemerintah, karena teks yang dimunculkan menunjukkan metafora memarginalkan khilafah.

Selain itu pada kalimat yang disampaikan Aiman,

“kelompok ISIS berkeinginan mendirikan sebuah ideologi khilafah, yaitu negara yang dikuasai satu pemimpin keagamaan dan politik menurut hukum Islam, jaringan teroris besar lainnya, Al-Qaeda juga ingin mendirikan negara Islam”

dan tulisan portal berita yang ditampilkan dalam tayangan Aiman

“pemerintah bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia, Wiranto: Ideologi Khilafah HTI Ingin meniadakan negara bangsa.”

Secara koherensi, kedua kalimat tersebut memiliki kata hubung (konjungsi) sebab akibat. Dua kalimat tersebut memiliki hubungan kasual yang membangun struktur pengetahuan, bahwa ideologi khilafah adalah gerakan terorisme yang juga diperjuangkan oleh organisasi internasional seperti ISIS dan Al-Qaeda. Kaligis (dalam Sari, 2017) mendefinisikan pengertian terorisme sebagai *crime again state* atau bentuk kejahatan yang bertujuan untuk meneror masyarakat dan negara. Dari pengertian tersebut, akhirnya pemerintah mengambil sikap tegas untuk membubarkan ormas HTI, karena ide khilafah yang diusung HTI dapat mengancam dan meniadakan konsep *nation state* (negara bangsa) yang selama ini dianut publik.

Hal itu sejalan dengan Kristianto dalam jurnalnya yang berjudul Membahas Khilafah, menjelaskan bahwa KompasTV melalui progam acara Aiman, telah menyandingkan HTI, khilafah dan ISIS. KompasTV ingin menjadikan benak publik terpikir bahwa HTI dengan ISIS memiliki tujuan yang sama, walaupun pada dasarnya caranya berbeda. Bahkan tidak adilnya lagi ketika host program Aiman tidak menanyakan sikap narasumber dari pihak HTI, sehingga tidak ada waktu untuk menjelaskan khilafah dan metode HTI dalam memperjuangkannya (Kristianto, 2017).

Dari pernyataan Wiranto

“Ideologi Khilafah HTI Ingin meniadakan negara bangsa”

dan

“sebagai organisasi kemasyarakatan berbadan hukum, HTI tidak menerapkan peran positif dalam mendorong proses pembangunan nasional, mencermati pertimbangan tersebut dan mencermati aspirasi masyarakat, pemerintah secara tegas perlu mengeluarkan langkah-langkah hukum untuk membubarkan organisasi tersebut.”

Kedua kalimat tersebut juga memiliki hubungan koherensi kondisional, diantaranya ditandai dengan pemakaian anak kalimat pada kalimat kedua yang digunakan untuk memperjelas kalimat pertama. Anak kalimat tersebut menunjukkan kepentingan dari komunikator, yang memberi kesan bahwa khilafah adalah ideologi terlarang, serta tidak mendukung dalam pembangunan nasional. Anak kalimat tersebut ingin menggambarkan kepada publik bahwa khilafah bukanlah ideologi yang positif, sehingga bukan hanya memperjelas terhadap frase atau kata, akan tetapi juga melabelinya sebagai kesan negatif terhadap kelompok atau fakta sejarah kegemilangan peradaban khilafah.

KompasTV menjadikan pandangan Wiranto sebagai pihak yang secara sewenang-wenang mendefinisikan khilafah sesuai kepentingannya, tanpa menjelaskan secara komprehensif tentang benar dan salah histori ide khilafah. KompasTV melakukan strategi eksklusif atau pengucilan terhadap khilafah, yaitu dengan mengklasifikasikannya sebagai ideologi negatif yang mengancam negara (Michel Foucault dalam Peters & Besley, 2014).

Aiman menyampaikan,

“piagam jakarta yang mensyaratkan syariat Islam bagi pemeluknya, telah diadopsi dan diambil jalan tengahnya persis sehari pascakemerdekaan Republik Indonesia, lima prinsip yang bahkan kita kenal sejak kecil, Pancasila tak pernah melarang ibadah dan apapun yang sesuai dengan tuntunannya, karena Indonesia membebaskan para penganutnya, lalu apa masalahnya?”

Kalimat tersebut merupakan keberpihakan dari pemilihan dua pandangan yang sebelumnya diungkapkan oleh Ismail Yusanto dan Ma'ruf Amin.

Pandangan pertama oleh ulama Ismail Yusanto,

“Kita harus memahami bahwa khilafah adalah ajaran Islam, bertujuan untuk melanjutkan kehidupan yang Islami, kehidupan yang adil, sejahtera dan damai. Dimana seluruh warga negara bisa menghargai satu sama lain, yang mungkar tidak berkembang leluasa seperti sekarang ini”

Berbeda dengan pandangan kedua dari Ma'ruf Amin, ketua MUI yang menyatakan

“khilafah adalah ajaran yang tidak disepakati oleh umat Islam, karena 23 negara Islam tidak menerapkannya.”

Secara intertekstualitas, reporter Aiman secara jelas memperkuat dan menempatkan dirinya sebagai bagian dari teks pandangan ulama yang kedua, yaitu Ma'ruf Amin sebagai pihak yang menolak khilafah.

Kalimat lain disampaikan Aiman

"lalu apa masalahnya"

dan

"mengapa belakangan isu ini semakin mencuat dan mengkhawatirkan banyak pihak?"

Pengandaian yang dilakukan reporter tersebut menghubungkan dari teks lain yang menjelaskan khilafah merupakan suatu ancaman, ataupun bentuk tindakan terorisme. Sehingga secara intertekstualitas, kalimat pengandaian tersebut mengesankan apa yang disampaikan KompasTV merupakan suatu kebenaran. Penilaian tersebut secara tidak sadar diterima *taken for granted* oleh publik, sehingga bisa memanipulasi ide khilafah, karena selalu dihubungkan dengan pengandaian semacam itu tanpa menampilkan pemahaman ide khilafah secara utuh.

Secara praktik diskursif, pada aspek *locutionary* mengindikasikan bahwa objek analisa khilafah digambarkan bermakna negatif, mengancam keutuhan otoritas negara, dan mengganggu kekuasaan dominan dengan seperangkat pengetahuan nasionalismenya. Dari aspek *illocutionary*, bahasa yang ditunjukkan berkonotasi membujuk kepada publik bahwa konsep *nation state* yang diterapkan sudah merupakan konsep terbaik yang harus diterima masyarakat, dan khilafah adalah ideologi minoritas yang negatif, atau 'tidak sesuai' dengan prinsip multikulturalisme di Indonesia. Selain itu, penggunaan leksikon pada bahasa yang ditampilkan juga berkonotasi menuduh, bahwa khilafah adalah ideologi terorisme yang mengancam negara. Jika pada aspek *perlocutionary*, wacana yang dimunculkan menciptakan realita bahwa ideologi Negara Indonesia sudah *final*, tidak boleh dirubah dan dikritik. Data *Saiful Mujani Research and Consulting* juga menunjukkan bahwa 79,3% mayoritas penduduk menolak sistem khilafah untuk ditegakkan di Indonesia (Ihsanuddin, 2017).

Pembahasan khilafah dalam program acara Aiman menampilkan realita yang buruk dan membahayakan. Hal itu terlihat dari detil yang disajikan seperti bentuk kalimat (siapa yang ditonjolkan), tata bahasa, leksison, dan juga metafora yang hendak disampaikan. Terdapat pengaturan isi media sesuai kebijakan produksi KompasTV, selain itu dalam penyajian informasi terdapat pemilihan-pemilihan konten yang disesuaikan dengan

kepentingannya. KompasTV juga tidak melakukan proses produksi dengan cara demokratis, sehingga wacana dan *genre* dikuasai sesuai kebijakan media KompasTV yang terkesan anti khilafah.

Menurut Michael Foucault, wacana Khilafah yang ditampilkan KompasTV didefinisikan sebagai objek pengetahuan yang terlihat negatif, ide terlarang dan dianggap membahayakan keutuhan bangsa. Dari pendekatan teori Foucault ini terlihat bahwa kekuasaan berjalan melalui penyebaran pengetahuan kepada publik secara strategis, selanjutnya pengetahuan yang disebarkan bisa melanggengkan dominasi kekuasaan, yaitu dengan mendiskriminasi khilafah dan mengabsahkan ideologi nasionalisme secara perlahan.

3.2 Relasi Kuasa KompasTV

Pada aspek situasional, diskursus khilafah yang ditampilkan KompasTV pada dasarnya berimbang dengan situasi mayoritas masyarakat Indonesia yang menolak ideologi khilafah. Selain itu, pemberitaan khilafah sebagai ideologi negatif berkaitan erat dengan peristiwa terakhir kejadian Bom bunuh diri di Kampung Melayu Jakarta pada 24 Mei 2017, serangan Bom tersebut berselang satu hari dengan aksi serupa yang terjadi di Manchester, Inggris. Serangan yang terjadi adalah bentuk gerakan yang dilakukan kelompok teror ISIS dalam melancarkan operasi global, salah satunya di Indonesia (Sofwan, 2017).

Selain itu, Wiranto (dalam Erdianto, 2017) menyatakan rencana pemerintah dalam membubarkan HTI adalah bentuk ketegasan terhadap ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, aktivitas HTI dinilai pemerintah dapat menimbulkan benturan di masyarakat dan mengancam keutuhan NKRI. Menanggapi sikap pemerintah, HTI melakukan upaya perlawanan politik dengan melakukan komunikasi terhadap lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. HTI juga mencari dukungan dari ormas-ormas lain agar eksistensi dan legitimasi dakwah mereka dapat terus berjalan.

Dari serangkaian peristiwa tersebut, praktik wacana khilafah yang dimunculkan KompasTV ditujukan untuk memberikan emosi negatif terhadap masyarakat, sekaligus menampilkan ketakutan terhadap masyarakat dengan menggambarkan perjuangan khilafah sebagai gerakan teror yang mengancam stabilitas publik. Isu ISIS digunakan oleh kepentingan KompasTV untuk memberikan stigma negatif pada khilafah, sistem khilafah yang sangat mulia di mata ulama itu digambarkan sebagai sistem yang buruk, sumber konflik, menakutkan seperti yang tergambar pada ISIS (Syarifuddin, 2017). Penggunaan taktik berbasis rasa takut tersebut adalah bentuk *scaremongering*. Artinya ketakutan publik dibangun secara sistematis secara individu atau kolektif guna memunculkan kepanikan moral,

agar pihak yang menyebarkan rumor atau desas-desus negatif menjadi terlindungi, serta menarik massa agar sesuai keinginannya (Adam Phillips dalam Glassner, 1999).

Praktik wacana tersebut tidaklah terlepas dari pengaruh institusional KompasTV maupun dari pihak pemerintah. Dari aspek historis berdirinya media Kompas di awal tahun 1960, dalam buku *Kekerasan Budaya* pasca 1965 dijelaskan, bahwa PK Ojong selaku pendiri awal media Kompas memiliki hubungan erat dengan Ivan Kats, seorang agen CIA yang masuk ke dalam *Congres For Cultural* yang berpusat di Prancis. Konggres itu bertujuan menggalang gerakan anti komunis dan menyebarkan ideologi sekulerisme, liberalisme, dan pluralisme (Herlambang, 2015).

Jika dilihat dari pendekatan Michael Foucault, aktivitas komunikasi, hubungan manusia, kelembagaan dan kekuasaan selalu hadir dalam hubungan yang mengandung niat seseorang untuk mengarahkan perilaku orang lain (Dosi, 2012). Hubungan erat Ivan Kats terhadap pendiri awal KompasTV adalah bentuk hubungan kuasa yang memiliki misi sesuai kepentingan agen CIA, khususnya dalam menyebarkan ideologi sekulerisme, liberalisme dan pluralisme. Begitu halnya pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi KompasTV, menurut Foucault juga sebagai praktik strategis kekuasaan yang berimplikasi bagi langgengnya hegemoni negara.

Selain itu, jika dilihat dari pendekatan kontrol negara teori Ekonomi Politik media Noam Chomsky, diskursus khilafah yang ditampilkan KompasTV berjalan sesuai dengan sistem politik yang berfungsi di Indonesia, yaitu dengan ideologi pancasila dan konsep *nation state* yang diterapkan. Seperti yang diungkapkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Wiranto menjelaskan bahwa khilafah adalah ide yang mengancam kedaulatan politik dan Negara Indonesia, karena berorientasi meniadakan konsep *nation state*, untuk mendirikan negara Islam dalam konteks wilayah yang luas (Erdianto, 2017). Institusi pemerintah mempengaruhi kehidupan dan kebijakan yang diberlakukan KompasTV dalam setiap pemberitaannya, yaitu dengan cara melabeli khilafah sebagai ideologi yang berseberangan dan terlarang. Dalam konteks ini, KompasTV menempati posisi yang sentral untuk menciptakan dan mendukung ‘realitas’ wacana khilafah yang berkembang di masyarakat, hal itu dikarenakan masyarakat praktis menjadi bagian yang tak bisa dipisahkan dari kesepakatan untuk bersatu dalam kesatuan dan norma politik besar seperti negara.

Sudirman Tebba (dalam Badara, 2012) menjelaskan pertimbangan ideologis suatu media massa biasanya ditentukan oleh latar belakang agama maupun nilai-nilai yang diembannya. Jika dilihat dari latar belakang pemilik KompasTV, Jakob Oetama juga

merupakan seorang humanis kristiani yang melakukan aktivitas pengabdianya senantiasa didasarkan pada misi religius yang dianutnya (Frans Seda dalam Badara, 2012). Sehingga, bahasa yang ditampilkan KompasTV lebih mengarah pada sikap diskriminasi dan antipati terhadap ajaran agama Islam. Fairclough (1995) menjelaskan, bahwa bahasa adalah bentuk ideologi material yang diinvestasikan secara dialektis oleh suatu kepentingan. Dari pengertian tersebut, menunjukkan bahwa KompasTV berada dalam posisi lingkaran kekuasaan pemerintah, karena cenderung berpihak pada ideologi nasionalisme sekuler yang diemban negara.

Sehingga terdapat relasi kuasa yang berjalan, seperti digambarkan oleh Michael Foucault (dalam kamahi, 2017) bahwa produksi wacana khilafah adalah ikonografi praktik kekuasaan yang tidak beroperasi secara represif dan intimidatif, melainkan bekerja secara kreatif dan strategis oleh ideologi yang secara tersembunyi beroperasi dibalik program Aiman “mendadak khilafah”. Yaitu dengan menggunakan pemerintah sebagai subjek yang berwenang dalam menentukan kebenaran.

3.3 Khilafah versus Nasionalisme

Dalam konteks historis dinamika politik di Indonesia, sebenarnya sudah muncul pertentangan antara konsep agama & Negara. Latief (2017) menjelaskan upaya pemisahan antara agama dalam wilayah politik sudah dimulai sejak masa penjajahan, proyek-proyek sekulerisasi tersebut dapat ditelusuri ketika usaha kaum penjajah Belanda melumpuhkan gerakan perlawanan masyarakat bumiputra yang mayoritas adalah beragama Islam. Ketika itu, bangsa Indonesia memilih untuk menjadikan Islam sebagai faktor pemersatu untuk mengusir Belanda, dengan menggunakan sentimen keislaman sebagai faktor tunggal perlawanan dalam mengusir penjajah, sehingga memunculkan banyak gerakan umat Islam dalam melakukan perlawanan dan pemberontakan untuk membela tanah air. Bagi pihak Belanda, gerakan-gerakan tersebut perlu ditumpaskan, salah satunya menggunakan cara kultural, sosial, pendidikan maupun pembatasan umat Islam dalam kekuasaan politik di tanah air.

Selain itu, pada masa kemerdekaan juga terdapat perdebatan, khususnya saat terjadi Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), terdapat dua aliran yang berbeda saat pembahasan dasar negara Indonesia, yakni golongan Islamis yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam dan golongan nasionalis sekuler yang menginginkan pemisahan urusan negara dan urusan Islam, setelah perdebatan panjang, pada

akhirnya disepakati bahwa dasar Negara Indonesia adalah Pancasila. Hal ini merupakan jalan tengah antara konsep negara sekuler dan negara Islam (Suratno, 2008).

Pasca reformasi, sistem politik demokrasi semakin digalakkan kembali dengan munculnya beragam nu politik maupun partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Bahkan mulai muncul sistem kapitalisme yang menjadikan pintu investor asing dapat semakin terbuka, sehingga penggabungan model ekonomi kapitalis dalam sistem politik demokrat menghasilkan ideologi kapitalis demokrat, yaitu adanya ketergantungan pemerintah Indonesia terhadap kaum kapitalis yang berkuasa menggerakkan masyarakat

Kekuatan kapitalisme tersebut menjadi faktor penentu model nasionalisme di Indonesia. Nusantarariya (2015) menjelaskan, nasionalisme di Indonesia dapat diartikan sebagai wujud kesetiaan negara bangsa, rasa tersebut muncul ketika adanya ancaman nasional dari gerakan separatis dan gerakan yang bersifat ideologis. Selain itu, nasionalisme pasca reformasi juga diartikan sebagai bentuk partisipasi segenap bangsa negara dalam ikut serta mengisi dan mengamankan tuntutan cita-cita nasional. Semangat nasionalisme tersebut muncul misalnya ketika isu khilafah mencuat di Indonesia, hingga menimbulkan efek yang mengagetkan publik. Sehingga menjadikan sebanyak 79,3 persen mayoritas penduduk di Indonesia menolak adanya ideologi khilafah (Ihsanuddin, 2017).

Jika dilihat dari awal kemunculannya, nasionalisme adalah spirit gerakan organisasi internasional Yahudi yang dideklarasikan pada konferensi Basel tahun 1887, gerakan tersebut bertujuan menumpaskan Daulah khilafah Turki Ustmaniyah, karena dianggap menjadi perintang terbesar misi kaum Yahudi untuk mendirikan negara bangsa mereka di tanah Palestina. Cara yang dilakukan gerakan Yahudi dengan menumbuhkan bibit-bibit kebangsaan (nasionalisme) terhadap masyarakat Arab, agar memisahkan diri di bawah kepemimpinan Turki Ustmani, sampai pada akhirnya gerakan tersebut berhasil meruntuhkan kekuasaan khilafah Ustmani puncaknya pada 3 Maret 1924. Dengan demikian, mengakibatkan wilayah kekuasaan Turki Ustmani terpecah menjadi negara bangsa-bangsa sampai sekarang, salah satunya adalah Indonesia (Azzam, 2001). Padahal sebelumnya, wilayah nusantara masuk dalam bagian supremasi politik Islam Turki Ustmani (Saifullah, 2015).

Di sisi lain, era reformasi atau disebut era kebebasan politik, juga telah menciptakan kondisi baru yang mendukung bangkitnya kembali gerakan politik Islam dan gagasan tentang penerapan syariat Islam di Indonesia, seperti munculnya organisasi Islam Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front pembela Islam (FPI), dan Laskar Jihad, yang notabene gerakan tersebut memiliki tujuan agar syari'at Islam ditegakkan di Indonesia (Setiawan, 2008).

Akan tetapi, upaya sekulerisasi di Indonesia masih terus dilakukan, bahkan terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia, termasuk dalam wilayah sosial, pendidikan dan politik. Sehingga dalam praktiknya, pemerintah Indonesia biasanya mengambil sikap represif terhadap umat Islam, seperti organisasi massa, partai politik maupun kemahasiswaan. Karena gerakan politik umat Islam dianggap dapat mengganggu dan mengancam stabilitas nasional (Latief, 2017). Hal itu bisa dibuktikan salah satunya dari sikap pemerintah saat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) nomor 2 tahun 2017, sebagai perubahan atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Pemerintah melakukan upaya tersebut untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), pemerintah beranggapan bahwa ide khilafah yang diusung HTI bertentangan dengan ideologi pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2017).

Begitu halnya dengan diskursus khilafah yang ditampilkan program Aiman KompasTV, bukanlah teks yang muncul sebagai sesuatu yang alamiah dan netral, akan tetapi bentuk pertarungan wacana yang di dalamnya terdapat serangkaian produksi pengetahuan, sebagai bagian dari basis kekuasaannya (Halwati, 2013). Menurut Yasraf Amir Piliang (dalam Maqpuddin, 2009), media tidak dapat dipisahkan dari kepentingan yang ada di baliknya, dalam perkembangan media mutakhir setidaknya terdapat dua kepentingan besar, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan yang menentukan isi media.

Michel Foucault memahami kekuasaan sebagai kekuatan relasional yang secara mapan dan terorganisasi menembus tubuh sosial, yaitu dengan mekanisme pengaturan yang melibatkan disiplin, institusi dan profesionalisme. Sehingga kekuasaan dapat membentuk pengetahuan dan hierarki yang bekerja secara samar, tidak terlihat, tetapi mendominasi dengan menghasilkan wacana dan kebenaran (Karlberg, 2005). Dengan demikian, terdapat relasi kuasa dalam wacana khilafah yang dibangun KompasTV, *pertama*, aturan politik di Indonesia yang didasarkan pada ideologi pancasila dan konsep nasionalisme, belum lagi adanya tuntutan untuk mendukung pembangunan nasional, seperti yang diungkapkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia, Wiranto yang menjelaskan bahwa gerakan khilafah HTI berpotensi mengancam kedaulatan politik dan tidak berperan positif bagi proses pembangunan nasional, karena berorientasi ingin meniadakan konsep *nation state*, sehingga perlu dibubarkan (Erdianto, 2017).

Kedua, adanya kelompok elit seperti pemerintah dan pemilik media yang sengaja mendominasi dan mengontrol arah produksi “mendadak khilafah” KompasTV, hal itu dapat dilihat dari pemilihan subjek pembicara yang lebih banyak didominasi oleh pihak yang

menentang khilafah, seperti Jokowi dan Wiranto di pihak pemerintah, selain itu Din Syamsuddin dan Ma'ruf Amin selaku tokoh agama dan petinggi MUI. *Ketiga*, bentuk pengetahuan yang hendak ditampilkan dalam wacana adalah konsep atau teori bahwa khilafah merupakan ideologi yang negatif, berbahaya dan diposisikan sebagai ide gerakan yang mengancam negara, sekaligus sebagai ideologi sekelompok minoritas yang tidak sesuai dengan konsensus politik masyarakat. Sehingga, teks yang memarjinalkan khilafah tersebut merepresentasikan ideologi nasionalisme sekuler yang ada dalam masyarakat, artinya ideologi sekulerisme itu berperan dalam membentuk teks yang sekuler pula, ideologi tersebut dilakukan oleh elit pemerintah secara sistematis dan terstruktur melalui kontrol media KompasTV, yaitu dengan mempersuasi publik agar sistem politik negara yang berasaskan Pancasila dan konsep *nation state* diterima secara 'lebih benar.'

Padahal ideologi nasionalis berangkat dari dua konsep kunci yang senantiasa muncul dalam kehidupan modern, yakni negara (*state*) dan masyarakat (*society*) yang merupakan dua entitas yang tak terpisahkan. Masing-masing ingin mandiri, pihak negara tidak ingin diperalat oleh masyarakat, sedangkan masyarakat juga tidak ingin ditundukkan oleh negara. Pada akhirnya problem negara-masyarakat tersebut diatasi dengan ideologi nasionalis yang berupaya merekatkan hubungan antara keduanya seakan-akan bersifat baik dan alami. caranya adalah dengan melakukan seleksi nilai-nilai atau ideologi yang memiliki signifikansi politik guna menggalang dukungan massa atas klaim keunikan dalam satu masyarakat tersebut dibanding masyarakat negara lain (Breully dalam Budiawan, 2017).

Sejak awal kemunculannya "nasionalisme dan negara bangsa bukan sesuatu yang sudah ada dalam peradaban politik manusia, tapi fenomena baru yang berkembang dan dilahirkan melalui rahim kepentingan kapitalisme. Karena kata *nation* di Eropa sebelum abad ke-19 tidak punya makna kultural dan politik apapun, dengan kata lain bahasa atau etnisitas tidak pernah menjadi fondasi dalam sejarah perkembangan masyarakat Eropa, khususnya dalam membentuk identitas politik yang disebut bangsa, kecuali setelah abad ke-19 sebagai periode awal perkembangan kapitalisme" (Lay, 2006, p.170). Belum lagi nasionalisme itu adalah proyek negara yang bersifat politis, agar diterima masyarakat, maka nasionalisme menampilkan dirinya dalam wajah kultural seakan-akan itu suatu bagian penting yang harus diterima masyarakat, oleh karena itu ideologi nasionalis pada dasarnya adalah solusi semu atas setiap permasalahan yang muncul (Budiawan, 2017). Dengan demikian, pada akhirnya khilafah dimunculkan sebagai alternatif atas kepentingan kapitalisme tersebut. Akan tetapi pada realitas wacana yang dibentuk KompasTV, khilafah lebih digambarkan negatif, tidak relevan dan mengancam stabilitas negara.

Jika dilihat dari dinamika yang terjadi, khilafah memang selalu berlawanan dengan sistem politik modern *nation state*. Belum lagi, kondisi masyarakat konsumen media yang plural, seringkali terjadi kesulitan untuk mempertemukan antara religius dan komitmen nasionalisme, pihak pemerintah acap kali meletakkan Islam sebagai simbol eksklusifitas dan anti kebhinekaan yang berlawanan dengan nilai-nilai kebangsaan (Latief, 2017). Sehingga dengan menggunakan dalih tersebut, diskriminasi khilafah dan sekulerisasi politik terus dipaksakan, karena keberadaannya berpotensi merusak struktur kekuasaan yang ada.

4. PENUTUP

Hasil penelitian ini menampilkan wacana bahwa khilafah adalah ideologi yang negatif, berbahaya, dan diposisikan sebagai ide yang terlarang, sekaligus sebagai ideologi sekelompok minoritas yang tidak sesuai dengan konsensus politik yang berlaku. Dalam praktiknya, ‘realitas’ wacana khilafah adalah produk dari relasi kuasa yang mengikat media KompasTV untuk melanggengkan ideologi dominan yang dianut negara, yaitu dengan melakukan diskriminasi dan pengucilan ide khilafah, karena perjuangan penegakkan khilafah di Indonesia dianggap berkonfrontasi mengancam struktur kekuasaan yang sudah dibangun oleh negara.

Peneliti menemukan adanya perjuangan ideologi nasionalisme yang beroperasi dibalik media KompasTV, secara terus-menerus disebarluaskan salahsatunya melalui program acara Aiman “mendadak khilafah” yang ditayangkan pada Senin, 12 Juni 2017. KompasTV menempatkan pihak negara sebagai wacana dominan, sehingga wacana yang dimunculkan adalah bagian dari upaya media KompasTV, untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia secara *taken for granted*, bahwa ideologi Pancasila dan konsep *nation state* sebagai suatu kebenaran.

Kedepannya, para akademisi diharapkan dapat melakukan penelitian lain secara serupa dengan mengembangkan analisis wacana kritis yang lebih komprehensif dari data teks berupa visual gambar/grafis, sekaligus bisa menggunakan teori hegemoni kekuasaan untuk memperdalam analisis melalui sudut pandang lain, dalam mendobrak praktik kekuasaan yang beroperasi dibalik media televisi di Indonesia.

PERSANTUNAN

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan publikasi ilmiah ini. Selain itu, ucapan terimakasih juga diberikan kepada orang tua dan para sahabat

yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi. Sekaligus kepada Pak Yudha Wirawanda, selaku dosen pembimbing yang dengan sabar telah mengarahkan dan membagi ilmunya selama proses penelitian, Jazakumullahu khairan katsiran.

DAFTAR PUSTAKA:

- Akbar, I. (2017). Khilafah Islamiyah: Antara Konsep dan Realitas Kenegaraan (Republik Islam Iran dan Kerajaan Islam Arab Saudi). *Journal of Government and Civil Society*, 1(1), 101-102.
- Almeida, E. P. (2011). Palestinian and Israeli Voices in Five Years of U.S. Newspaper Discourse. *International Journal of Communication*, 5, 16-17.
- Amiri, M., Hashemi, M. R., & Rezaei, J. (2015). The Representation of Islamophobia: A Critical Discourse Analysis of Yahoo News. *Indian Journal of Science and Technology*, 8(28), 1-2.
- Azzam, A. (2001). *Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya*. Solo: Pustaka Al-'Alaq
- Badara, A. (2012). *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- BM, Mursito. (2012). *Realitas Media*. Surakarta: Spikom UNS
- Budi, S. (2004). Industri Televisi Swasta dalam Perspektif Ekonomi Politik. *Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1(1), 4-5.
- Budiawan. (2017). *Nasion dan Nasionalisme: Jelajah Ringkas Teoritis*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Burhan, F. (2017). Analisis Wacana Terhadap Teks Berita Pembubaran HTI pada Media Online Liputan6.com terbitan Mei-Juli Tahun 2017. *Jurnalisa*, 1(3), 133-134.
- Dosi, E. (2012). *Media Massa dalam Jaring Kekuasaan*. Maumere: Penerbit Ledalero.
- Erdianto, K. (2017, 8 Mei). Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. *Kompas.com*. Diperoleh dari www.kompas.com
- Eriyanto. (2006). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. New York: Longman Publishing
- Feng, D. (2016). Doing "Authentic" News: Voices, Forms, and Strategies in Presenting Television News. *International Journal of Communication*, 10, 1-2.
- Glassner, B. (1999). The Construction of Fear. *Journal Sociology University of Southern California*, 22 (4), 302-303.

- Halwati, U. (2013). Analisis Foucault dalam Membedah Wacana Teks Dakwah di Media Massa. *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 1(1), 156-157.
- Haryatmoko. (2016). *Critical Discourse Analysis: Landasan Teori, Metodologi dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herlambang, W. (2015). *Kekerasan Budaya Pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film*. Tangerang: Margin Kiri
- Hizbut Tahrir Indonesia. (2010). *Jejak Syariah dan Khilafah di Indonesia*. Diperoleh dari www.slideshare.net
- Ibrahim, I. S., & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi dan komodifikasi: Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Ihsanuddin. (2017, 4 Juni). Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah. *Kompas*. Diperoleh dari <http://nasional.kompas.com>
- Kamahi, U. (2017). Teori Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(1), 118-119.
- Karlberg, M. (2005). The Power of Discourse and The Discourse of Power: Pursuing Peace Through Discourse Intervention. *International Journal of Peace Studies*, 10(1), 4-5.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2017). Pemerintah Keluarkan Perppu No. 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Ormas. Diperoleh dari <https://kominfo.go.id>
- Khalil. M. (1984). *Khalifah sepanjang Pimpinan Al Quran dan Sunnah*. Solo: Penerbit Ramadhani
- Komara. E. (2015). Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi. *Social Science Education Journal*, 2 (2), 123-124.
- KompasTV. (2017). About Us. Diperoleh dari <https://www.kompas.tv>
- Kristeva, N. S. S. (2015). *Sejarah Ideologi Dunia: Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Fasisme, Anarkisme, Anarkisme-Marxisme, Konservatisme*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.
- Kristianto, H. (2017). Catatan Untuk Aiman dan Kompas TV yang Mendadak Khilafah. *Jurnal Membahas Khilafah*, 2, 3-4.
- Latief, M. (2017). Islam dan Sekularisasi Politik di Indonesia. *Jurnal Peradaban Islam*, 13 (1), 2-15.
- Lay, C. (2006). Nasionalisme dan Negara Bangsa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 10 (2), 170-171.

- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). *Teori Komunikasi*, edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.
- Maqpuddin. (2009). Ideologi Media Massa dan Pengembangan Civil Society. *Jurnal Academica Universitas Tadulako*, 1 (2), 191-194.
- Morrison. (2014). *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Munfarida, E. (2014). Analisis Wacana Kritis dalam Perspektif Norman Fairclough. *Jurnal Komunika*, 8(1), 6-7.
- Muttaqin, A. (2012). Agama dalam Representasi Ideologi Media Massa. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2(6), 6-7.
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). Pemetaan Lansekap Industri Media di Indonesia: Sebuah Pengantar. *Jurnal Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer di Indonesia*, 13-14.
- Nusarastrya, Y. H. (2015). Sejarah Nasionalisme Dunia dan Indonesia. *Jurnal Pax Humana*, 3(3), 19-20.
- O'sullivan, T., Hartley, J., Saunders, D., Montgomery, M., & Fiske, J. (1994). *Key Concepts in Communication and Cultural Studies*. London: Routledge
- Peters, M. A., & Besley, T. A. C. (2014). Social Exclusion/Inclusion: Foucault's Analytics of Exclusion, The Political Ecology of Social Inclusion and The Legitimation of Inclusive Education. *Open review of Educational Research*, 1 (1), 103-104.
- Pujileksono, S. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing
- Ric. (2017, 20 Agustus). Menjaga Keberagaman Menjadi Tugas Bersama. *Media Indonesia*. Diperoleh dari www.mediaindonesia.com
- Ruri. (2016, 5 maret). Foto Aiman Witjaksono, Penyiar Berita Aiman KompasTV. Diperoleh dari <http://jurnalpagi.com>
- Saifullah, A. (2015). *Khilafah dan Jejak Islam Kesultanan Islam Nusantara*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah
- Samsul, L. O. (2015). Pemberitaan Berdirinya Khilafah: Analisis Wacana Kritis pada Tabloid Media Umat. *Jurnal Dialektika*, 1(1), 1-2.
- Sari, K. (2017). Analisis Framing Terorisme dalam Pemberitaan Kelompok Abu Sayyaf di Koran Solopos dan Joglosemar edisi Juni-September 2016. Skripsi thesis Universitas Muhammadiyah Surakarta, 7-8.

- Setiawan, Y. B. (2011). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 1(2), 16-17.
- Setiawan, Z. (2008). Dinamika Pergulatan Politik dan Pemikiran Formalisasi Syariah pada Era Reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Hubungan Internasional*, 5(2), 87-88.
- Sofwan, R. (2017, 25 Mei). Bom Kampung Melayu Bagian Operasi Global ISIS Jelang Ramadan. CNN Indonesia. Diperoleh dari www.cnnindonesia.com
- Sudrajat, A. (2009). Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif Sejarah. *Jurnal Informasi Universitas Negeri Yogyakarta*, 2 (35), 3-4.
- Suranto, Herlina S. D., & Setiawan, B. (2017). Agama dan Media: Diskursus LGBT dalam Opini SKH Republika. *Jurnal Komuniti*, 9 (2), 106-107.
- Suratno. (2008). Rekonfirmasi Posisi Pancasila Vis-à-vis Islam. *Jurnal Melintas Universitas Katolik Parahyangan*, 3 (24), 4-5.
- Syarifuddin, U. (2017). Wacana Hegemonik ‘Mendadak Khilafah’ di KompasTV: Contoh Penyakit Media Ketika Membicarakan HTI. *Jurnal Membahas Khilafah*, 2, 17-18.
- Ulil. (2014). Khilafah dalam Pandangan NU. Diperoleh dari <http://www.nu.or.id>
- Wahid, KH. A. (2009). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid
- Wijayanto. (2016, 16 Agustus). Kompas dan FPI: Kisah Usang Yang Terus Berulang. *Remotivi*. Diperoleh dari www.remotivi.or.id
- Williams, K. (2003). *Understanding Media Theory*. London: Arnold Publishers